

POLA PEMBERDAYAAN GERAKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI LOMBOK BARAT

Arif¹, Mas'ad², Amil³

^{1,3}Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

arifmpd123@gmail.com¹, sitimasad@gmail.com²

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: a) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pola pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi lebih khusus UMKM di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat b) Untuk menganalisis Program apa saja yang telah dilaksanakan di bidang usaha ekonomi khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sub bidang bantuan pembangunan dan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Lombok Barat c) Untuk mendeskripsikan dampak program pemberdayaan bidang usaha ekonomi terhadap kemandirian usaha ekonomi masyarakat miskin di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat d) Untuk menganalisis Pola Manajemen UMKM di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ada dua informan dalam penelitian ini yaitu: 1) Informan kunci dalam penelitian ini yaitu pejabat dinas terkait (dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Lombok Barat) dan Ketua Kelompok GEMAWIRA sedangkan, 2) Informan terpilih merupakan pengusaha UMKM di Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat. Hasil Penelitian: 1. Mekanisme Pelaksanaan Pola Pemberdayaan Masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Barat khususnya di Kecamatan Labuapi telah dilaksanakan namun masih belum maksimal, 2. Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Barat khususnya pada Bidang Usaha Ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga. Setiap pelaksanaan program selalu diawali dengan tahap persiapan sebagai langkah awal pengenalan program kepada masyarakat, 3. Dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Barat telah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan, tetapi ada juga dampak buruk yang timbul dalam menjalankan usaha mereka, 4. UMKM sebagai salah satu bentuk perekonomian rakyat yang memiliki peran besar dalam perekonomian negara, memerlukan model manajemen usaha.

Kata Kunci: Pola Pemberdayaan; Ekonomi Masyarakat; UMKM.

Abstract: *This study aims to: a) To find out the mechanism for implementing the pattern of community empowerment through community empowerment programs in the field of economic business, more specifically MSMEs in Labuapi District, West Lombok Regency b) To analyze what programs have been implemented in the field of economic business, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the sub-sector of development assistance and community economics by the West Lombok Government c) To describe the impact of the economic business empowerment program on the economic independence of the poor in Labuapi District, West Lombok Regency d) To analyze the MSME Management Pattern in Labuapi District, West Lombok Regency. This study uses a qualitative approach. The research was conducted in Labu Api District, West Lombok Regency. This study uses a qualitative approach. The research was conducted in Labu Api District, West Lombok Regency. There are two informants in this study, namely: 1) The key informants in this study were officials from the relevant offices (the UMKM and Cooperatives of Lombok Barat Regency) and the Chair of the GEMAWIRA Group, while, 2) The selected informants were UMKM entrepreneurs in Labu Api Subdistrict, West Lombok Regency. Research result: 1. The mechanism for implementing the Community Empowerment Pattern through community empowerment programs in the MSME sector by the Cooperatives and MSMEs Office of West Lombok Regency, especially in Labuapi District, has been implemented but is still not optimal, 2. Programs that have been implemented by the West Lombok Regency Cooperatives and SMEs Service, especially in the Business Sector Economics includes individual assistance and institutional assistance.*

Keywords: Empowerment Pattern; Economic society; MSMEs



Article History:

Received: 22-06-2021

Revised : 05-09-2021

Accepted: 06-09-2021

Online : 11-09-2021



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Negara Indonesia juga kaya dengan budaya seperti adat istiadat, suku bangsa, jenis kuliner, ras, Bahasa, itu semua terikat dalam Bhineka Tunggal Ika. Secara umum pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari budaya. Dilihat dari segi ekonomi di Propinsi NTB lebih khusus di kabupaten Lombok barat tingkat pendapatan masyarakat masih dibawah standar UMP, (Wihastuti & Rahmatullah, 2018). UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana, (Suci et al., 2017)

Kabupaten Lombok Barat tidak setenar pariwisatanya yang maju, yang kreen dan trending di mata Indonesia dan dunia dengan adanya pariwisata sengigi, tetapi masih banyak kemiskinan, di sini dapat ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan, (Permono et al., 2020). Oleh karena itu kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta tidak dapat ditunda penanggulangannya. Untuk menanggulangi kemiskinan tersebut perlu pola untuk melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya bidang ekonomi, nota bene tingkat usaha ekonomi mikro, kecil, menengah di kabupaten Lombok barat masih di kategorikan industri mikro.

UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana, (Yunarni & Haris, 2020). UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.

Dengan memberikan kewenangan dan kekuatan kepada masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi yang tersedia secara optimal, sehingga mereka diharapkan dapat berdaya dalam memperbaiki kemampuan ekonomi mereka agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri. Pemberdayaan UMKM rakyat di sini merupakan upaya dalam mendorong perubahan struktural masyarakat dengan memperkuat kedudukan serta peran ekonomi rakyat dalam perekonomian, (Sriningsih et al., 2021).

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut, (Indonesia, 2008). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis ekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan

kegiatan usahanya, (Setyanto et al., 2015).

Dari hasil pengamatan awal penulis bahwa terdapat suatu masalah yang sering dialami oleh para pelaku Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) saat ini yaitu, (1) pendanaan; (2) sarana dan prasarana; (3) informasi usaha; (4) kemitraan, (Rahmadani et al., 2019). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, (Hendrawan et al., 2018).

Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara, (Machmud, 2013).

Namun demikian, kerja sama tersebut tetap perlu memegang prinsip kehati-hatian untuk memastikan terwujudnya manfaat bagi kedua pihak, (Sudaryanto & Wijayanti, 2013). Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan bahwa daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional, (Sedyastuti, 2018). Oleh karena daya saing industri merupakan fenomena di tingkat mikro perusahaan, maka kebijakan pembangunan industry nasional didahului dengan mengkaji sektor industri secara utuh sebagai dasar pengukurannya.

Sedangkan tingkat daya saing suatu negara di kancah perdagangan internasional, pada dasarnya amat ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan faktor keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Lebih lanjut, faktor keunggulan komparatif dapat dianggap sebagai faktor yang bersifat alamiah dan faktor keunggulan kompetitif dianggap sebagai faktor yang bersifat *acquired* atau dapat dikembangkan/diciptakan, (Sedyastuti, 2018). Pemberdayaan UMKM rakyat di sini merupakan upaya dalam mendorong perubahan struktural masyarakat dengan memperkuat kedudukan serta peran ekonomi rakyat dalam perekonomian. Salah satu dampak diberlakukannya CAFTA adalah membanjirnya produk-produk China di pasar Indonesia Produk-produk tersebut termasuk pesaing dari produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM Indonesia, seperti misalnya produk keramik, pakaian jadi, produk alas kaki (sepatu/sandal), mebel, dan produk kerajinan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi produk-produk UMKM.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan berbagai data dan informasi akan dilakukan melalui observasi partisipasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap sumber data yang diperlukan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan teknik *focus group discussion* diantara para informan kunci (*key informan*) dalam menentukan informan pada penelitian ini. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari orang-orang yang memiliki informasi, kapabilitas, dan pengetahuan jaringan terhadap subyek penelitian yang pada akhirnya akan mengarahkan peneliti ke informan terpilih.

Ada *dua* informan dalam penelitian ini yaitu: **pertama**, informan kunci dalam penelitian ini yaitu pejabat dinas terkait (dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Lombok Barat) dan Ketua Kelompok GEMAWIRA sedangkan, **kedua** informan terpilih merupakan pengusaha UMKM di Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat.

Informan diambil berdasarkan *focus group discussion* peneliti dengan pejabat dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Lombok Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Etta dan Sopiah (2013) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

1. Observasi

Observasi bertujuan untuk pencatatan pola strategi UMKM, selanjutnya wawancara dilanjutkan ke kantor dinas UMKM dan Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat.

2. Wawancara secara Terbuka

Wawancara langsung dengan dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Lombok Barat dan Ketua Kelompok GEMAWIRA, serta pelaku usaha UMKM di Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat, setelah cukup peneliti akan melakukan observasi di lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan hubungan dengan fenomena lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pelaksanaan pola pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi lebih khusus UMKM di kecamatan labuapi kabupaten lombok barat. Mekanisme pelaksanaan pola pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi lebih khusus UMKM di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, terdapat beberapa kegiatan didalamnya yaitu pelatihan, pembinaan, dan pendampingan.

1. Kegiatan Pelatihan UMKM

Dalam kegiatan pelatihan ini para pelaku UMKM diajarkan atau dilatih tentang bagaimana meningkatkan giat berwirausaha di bidang UMKM. Selain itu, ibu ibu UMKM dilatih bagaiman cara mendapatkan Izin Usaha Micro, kecil dan menengah. Sebagaimana dari hasil wawancara kepada Anggota Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lombok Barat bahwa dalam pelatihan ini masyarakat giat dalam meningkatkan berwirausaha di bidang UMKM.

Dinas koperasi dan UMKM di Kabupaten Lombok Barat selalu melakukan

pembinaan kelompok masyarakat yang berwirausaha lebih khusus di kecamatan labuapi. Hal diatas sesuai dengan wawancara humas GEMAWIRA NTB, Ibu Ida menyatakan kegiatan pembinaan rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan durasi kegiatan 3 hari berturut turut di kelompok UMKM di labuapi.

2. Pendampingan Kegiatan UMKM

Lebih lanjut Humas GEMAWIRA mengemukakan bahwa pendampingan dilakukan oleh dinas koperasi untuk meningkatkan kualitas produk masyarakat selalu dilakukan dengan Kerjasama baik kelompok masyarakat berwirausaha maupun langsung oleh dinas koperasi dan UMKM di Kabupaten Lombok Barat.

Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM menyelenggarakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM. Pelatihan kewirausahaan ini bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas pribadi Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM. Selain itu, kegiatan ini juga bermaksud untuk meningkatkan kemampuan manajerial serta kewirausahaan bagi UMKM, sehingga tercapai kinerja yang optimal dan tumbuh berkembang menjadi UMKM yang sehat, tangguh, dan mandiri sebagai pelaku usaha dalam perekonomian rakyat.

Sosialisasi penyelenggaraan pelatihan ini dilakukan melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah kelompok PKK. Biasanya Dinas Koperasi dan UMKM memberitahukan kepada kelompok PKK masing-masing Kecamatan jika akan mengadakan pelatihan kewirausahaan ini. Kelompok PKK tersebut akan mensosialisasikan kepada anggota-anggotanya. Kemudian bagi yang berminat akan mendaftar pada pengurus kelompok PKK tersebut.

Pola Manajemen UMKM di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Secara umum, pelaku UMKM belum menerapkan manajemen secara konsisten dan komprehensif. Dalam manajemen produksi, pelaku UKM hanya memiliki persediaan sesuai dengan kemampuan modalnya, ketika memiliki dana yang cukup banyak maka mereka dapat menyediakan persediaan yang banyak pula, demikian sebaliknya. Hal ini tentunya berdampak pada biaya persediaan yang ditimbulkan, namun tak disadari oleh pelaku UMKM. Pada beberapa UMKM, pelaku tidak mau mengandalkan pinjaman dari bank, karena cukup sulitnya proses peminjaman (misalnya harus ada pembukuan atas usahanya), dan pelaku tidak ingin tergantung pada pinjaman modal. Pelaku UKM tidak mau terikat pada satu supplier saja, karena ingin mendapatkan sumber bahan baku yang beragam, yang bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.

Hal inilah yang menyebabkan sebagian pelaku mengalami kesulitan ketika akan melakukan penambahan modal dengan melakukan pinjaman ke bank. Karena bank menuntut adanya laporan keuangan yang lengkap dengan tujuan untuk mengetahui prospek usaha tersebut. Dengan tidak ada bantuan dan Kerjasama dari pihak bank, hal ini tentunya berdampak pada biaya persediaan yang ditimbulkan, namun tak disadari oleh pelaku UMKM. Pada beberapa UMKM, tidak mau mengandalkan pinjaman dari bank, karena cukup sulitnya proses peminjaman (misalnya harus ada pembukuan atas usahanya), dan pelaku tidak ingin tergantung pada pinjaman modal. Pelaku UKM tidak mau terikat pada satu *supplier* saja, karena ingin mendapatkan sumber bahan baku yang beragam, yang bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada, keadaan ini menyebabkan pelaku UKM merasa enggan berhubungan dengan pihak perbankan, (Bismala, 2016).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang disampaikan di atas, Pola pemberdayaan gerakan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) di kecamatan labuapi kabupaten lombok barat melalui beberapa tahapan yang sudah dijalankan oleh Dinas Koperasi dan pelaku UMKM, maka dapat disimpulkan bahwa: (1)

Mekanisme Pelaksanaan Pola Pemberdayaan Masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Barat khususnya di Kecamatan Labuapi telah dilaksanakan namun masih belum maksimal; (2) Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat khususnya pada Bidang Usaha Ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga. Setiap pelaksanaan program selalu diawali dengan tahap persiapan sebagai langkah awal pengenalan program kepada masyarakat. Tahap persiapan ini sangat penting karena dapat menentukan berhasil tidaknya program tersebut, sehingga dapat dijadikan landasan berjalannya suatu program. Dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Barat telah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan, tetapi ada juga dampak buruk yang timbul dalam menjalankan usaha mereka; (3) UMKM sebagai salah satu bentuk perekonomian rakyat yang memiliki peran besar dalam perekonomian negara, memerlukan model manajemen usaha. Model manajemen usaha ini mengadopsi dari manajemen perusahaan, yang bekerja pada aspek manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Dalam aplikasi manajemen usaha tersebut, dikembangkan kriteria pengukuran kinerja yang dapat diadopsi dan diaplikasikan secara praktis. Pelaku UMKM juga harus mampu melakukan analisis SWOT atas usahanya sehingga mampu menilai keadaan sekarang, baik terhadap pesaing, maupun perkembangan usaha dan evaluasi usahanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Barat, Ketua GEMAWIRA Lombok Barat serta Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendanai kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Bismala, L. (2016). Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Enterpreuner dan Entrepreneurship*, 5(1), 19–25.
- Hendrawan, A., Yulianeu, A., Sucahyawati, H., & Indriyani, I. (2018). Pengembangan Kompetensi UMKM Dengan Pembelajaran Organisasi. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 1(4), 489–496. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v1i4.53>
- Indonesia, U. (2008). *UU Republik Nomor 20 Tahun 2008*.
- Machmud, A. (2013). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Tahun 2012*.
- Permono, A. I., Putra, B. K. D., Alwi, M., Adalya, N. M., Pitoyo, A. J., & Alfana, M. A. F. (2020). Analisis Indikator Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. *Research Gate, October*, 1 s.d. 16. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30799.71848>
- Rahmadani, A., Hakim, L., & Setiawati, B. (2019). Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Wara Kota

- Palopo. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 244–261.
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127.
- Setyanto, A. R., Samodra, B. R., & Pratama, Y. P. (2015). Kajian Strategi Pemberdayaan UMKM Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN (Studi Kasus Kampung Batik Laweyan). *Etikonomi*, 14(2), 205–220. <https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2271>
- Sriningsih, S., Ismiwati, B., & Sayuti, M. (2021). Analisis Keserasian Belanja Modal Dan Belanja Operasional Pada Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kompetitif*, 7(1), 39–55. <https://ejournal.unizar.ac.id/index.php/kompetitif/article/view/352>
- Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah fakultasi Ekonomi*.
- Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. R. (2013). Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas Asean. *Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta*.
- Wihastuti, L., & Rahmatullah, H. (2018). Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 96–102. <https://jurnal.ugm.ac.id/jgs/article/view/34054>
- Yunarni, B. R. T., & Haris, A. (2020). Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(3), 333–342. <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i3.1224>